

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan Merupakan Permasalahan Yang masih rentan di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan secara ekonomi. Kemiskinan terjadi dapat di sebabkan oleh berbagai faktor salah satunya yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan yang lain dan pada akhirnya terjadi pengangguran. Saat ini peran pemerintah sangat di butuhkan sekaligus mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam proses pembangunan kedepannya. Oleh karena itu pemerintah membuat program mengenai pengentasan kemiskinan yang merujuk pada peraturan presiden RI Nomor 15 Tahun 2016, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya langkah langkah koordinasi secara terpadu yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan Kemiskinan.

Untuk menanggulangi Kemiskinan Pemerintah membuat salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Adalah Bantuan Pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat

(KPM). Dalam hal ini Desa Sei Rotan merupakan Salah Satu desa yang menjadi sasaran dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tersebut. Dikarenakan ada beberapa orang atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara kondisi ekonomi berhak menerima bantuan yang di salurkan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perlu melakukan evaluasi lebih terhadap program yang sedang berjalan yaitu dengan mengukur efektivitas sebuah program tersebut. Efektif atau Tidaknya program dapat dilihat dari hasil program yakni sejauh mana tercapainya sebuah program yang dilakukan. Maka untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan suatu program dapat dilakukan analisis sesuai dengan indikator indikator yang ada.

Saat sekarang ini pemerintah memiliki peranan penting tentang bagaimana berjalannya pelaksanaan bantuan yang diberikan untuk meringankan sedikit beban masyarakat miskin khususnya di desa sei rotan. Desa sei rotan merupakan salah satu desa yang menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT tentunya memiliki dampak positif maupun negatif, Maka dari itu diperlukan kembali evaluasi terhadap program yang sedang berjalan diakhir dari kegiatan yang telah terlaksana. Program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa sei rotan dilaksanakan mulai dari bulan januari sampai dengan bulan desember. Yang menjadi sasaran dalam program ini tentunya keluarga, yang selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25 % terendah. Hal ini akan terealisasikan pelaksanaannya melalui salah satu instansi Desa yaitu kantor kepala desa yang ada di sei rotan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di desa sei rotan tentunya bagi keluarga miskin dapat mengurangi sedikit beban dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kesehariannya, maka dari itu pemerintah menyalurkan dana bantuan kepada salah satu perangkat desa yaitu kepada kepala desa. setiap perorang berhak menerima bantuan sebesar 2.400.000. Dan dibagikan kepada penerima KPM sebanyak 155 KPM, Bantuan tersebut diterima selama 1 Tahun, dan setiap bulannya KPM menerima bantuan sebesar 200.000/ KPM tiap bulannya. Kemudian di desa tersebut memiliki RT/RW sebanyak 13 orang. Jadi setiap RT/RW mendapat tugas untuk mencari data kepada KPM yang benar benar butuh bantuan dalam pelaksanaan program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang seimbang kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan an mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan di desa sei rotan kecamatan batang kuis. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sei rotan disalurkan melalui elektronik warung gotong royong (E- Warong) . E- Warong adalah agen bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank penyalur dan di tentukan sebagai tempat wilayah penyaluran BPNT di sei rotan tersebut. Namun permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak penerima bantuan pangan non

tunai yang belum tepat (tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu). Hal ini menjadi salah satu perhatian untuk melihat keefektivitasan BPNT di wilayah tersebut.

Adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan bantuan penyaluran subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. maka dari itu adanya BPNT ini semoga dapat meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta program ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan yaitu bantuan dapat tepat sasaran dan tepat waktu agar nantinya dapat memberikan efektivitas terhadap Bantuan Pangan Non Tunai Yang Telah di salurkan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan penelitian penulis dengan judul adalah **“Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ”**. Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keefektifan bantuan yang telah disalurkan kemudian bantuan tersebut tepat sasaran, jumlah dan kualitas, tepat waktu, tepat tujuan serta tepat administrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas dalam pelaksanaan program penyaluran penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Sei Rotan?
2. Bagaimanakah implementasi tingkat ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan kualitas, ketepatan waktu, ketepatan tujuan serta ketepatan administrasi (5K) dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sei Rotan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Keefektivitasan dalam penyaluran program penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat miskin di Desa Sei Rotan Tersebut.
2. Untuk mengetahui ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan kualitas, ketepatan waktu, ketepatan tujuan serta ketepatan administrasi (5K) dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sei Rotan Tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melihat kendala yang terjadi pada bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta meningkatkan program lainnya untuk menanggulangi Kemiskinan.

1.5 Tabel 1 Identifikasi Masalah

Judul	Tahun	Rumusan Masalah	Metode Analisis	Variabel	Hasil
1. Efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) Kota Palembang.	2019	1. Apakah dengan Adanya Program BPNT dapat memberikan kepuasan terhadap Penerima bantuan. 2. Objek bagaimana yang cocok yang berhak menerima bantuan BPNT Tersebut	Metode Campuran (Mixed Method) Yakni melalui Metode kuantitatif secara deskripsi dan Kualitatif dengan melakukan wawancara.	1. Membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah di wujudkan. 2. Dengan Melihat tujuan yang tidak tercapai.	Program BPNT ini dilakukan belum efektif karena masih banyak memiliki hambatan yaitu kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program.
2. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan gulak galik.	2018	1. Bagaimanakah pelaksanaan efektivitas BPNT di gulak galik.	Metode deskripsi Kuantitatif.	1. Ketepatan sasaran program. 2. Sosialisasi Program. 3. Tujuan Program.	Pelaksanaan BPNT di Kelurahan gulak galik sudah berjalan efektif.
3. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kecamatan Probolinggo.	2020	Mengetahui tingkat keefektifan Program BPNT dan Mengetahui Tercapai atau tidaknya program ini.	Metode Deskripsi Kualitatif	1. Pemahaman Program. 2. Ketepatan Waktu dan 3. Tercapainya tujuan.	Program BPNT di probolinggo sudah efektif melihat koordinasi pendamping bantuan dan penerima bantuan dapat merasakan kepuasan.

4. Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan BPNT.	2018	1.Mengetahui Kinerja Program BPNT ini berjalan sesuai dengan tepat sasaran. 2.Mengetahui Tepat Waktu atau Tidak Bantuan tersebut.	Metode Analisis Kuantitatif Dan Deskripsi Kualitatif.	1.Jumlah Penduduk dengan Penerima Bantuan BPNT. 2. Sosialisasi Program yang dilaksanakan.	Efektivitas BPNT dilakukan sudah tepat sasaran artinya memberikan kepuasan.
5. Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Deli Serdang.	2020	1. Mengetahui Beberapa Kendala Dalam Menyalurkan BPNT Di Kabupaten Deli Serdang.	Metode Analisis Deskripsi Kualitatif.	1.Administrasi Kependudukan Masyarakat Kurang Lengkap. 2.Terlambatnya bantuan yang datang dari Kementerian.	BPNT disalurkan kurang efektif karena belum ada kerja sama antar petugas dengan penerima bantuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah salah satu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu : “efektive” yang berarti atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, hasil guna atau dukungan untuk tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan. Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018) Efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dengan : a. Adanya efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b. manjur atau mujarab, c. dapat membawa hasil, berhasil guna(usaha, tindakan).

Menurut Mahmudi, 2019 mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output, maka semakin efektif organisasi, program ataupun kegiatan.

Menurut Beni, 2016 mengatakan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, prosedur dan suatu organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi pada sektor publik, sehingga dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mempunyai

pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo, 2017 mengatakan bahwa Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

2.1.1 Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Hardlife dan Zhou, 2013 Evaluasi merupakan sebagai penilaian atau peningkatan kinerja suatu program yang sedang dilaksanakan dan hasil evaluasi nantinya dapat kita nilai apakah sebuah program atau kebijakan memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju.

Menurut Vendung (dalam buku Firyal dan Widya, 2018) evaluasi berkaitan dengan intervensi pemerintah yaitu perubahan sosial politik dan administrative yang direncanakan misalnya kebijakan publik, program publik, dan layanan publik. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/ siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan public yang dibuat itu dilaksanakan dan dievaluasi.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam buku Firyal dan Widya (2018) Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan

mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

Dari sederet menurut pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai konsep evaluasi dalam penelitian ini dapat merujuk kepada kebijakan artinya dalam pelaksanaan program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilokasi penelitian ini harus memperhatikan beberapa variabel diantaranya ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan kualitas, ketepatan waktu , ketepatan tujuan serta ketepatan administrasi, maka dari itu dalam pelaksanaan program tersebut merujuk kepada efektivitas. Sedangkan pada evaluasi yaitu kegiatan yang harus menjadi target setelah kegiatan dari program yang telah selesai dilaksanakan. contohnya meninjau kembali apa yang menjadi kekurangan pada saat program berlangsung, apakah dengan hadirnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Menurut (Ahda Sulukin Nisa, 2019). Dengan Metode Pendekatan Kualitatif dan bersifat Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Karena program ini hanya dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin.

Menurut (Diah Mukminatul Hasimi, 2020). Dengan Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 6T program BPNT dilapangan hanya dapat memenuhi 3T yaitu tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga.

Menurut (Imal Alimah Akmal, 2020). Dengan Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan BPNT yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu yang sudah sepenuhnya tercapai walaupun belum maksimal.

Menurut (M. Hidayat Panuntun, 2019). Dengan Metode Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa Belum dapat dijalankan sesuai dengan SOP yang ada karena masih ada masyarakat tidak memahami program BPNT. Kurangnya komunikasi dari pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang dimana tujuan yang hendak dicapai tidak maksimal.

Menurut (Benny Rachman, dkk, 2018). Dengan Metode Kualitatif Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah dalam transformasi pola subsidi (program rastra menjadi program bantuan sosial BPNT) langkah maju untuk memanfaatkan keuangan digital untuk memperluas keuangan inklusif.

2.1.3 Ukuran Ukuran Efektivitas

Adapun ukuran ukuran efektivitas sebagai berikut :

a. Target tujuan atau Hasil

Target tujuan merupakan salah satu harapan yang diinginkan bagi keberhasilan suatu pelaksanaan dalam kegiatan.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan apresiasi dari sebuah penilaian untuk memaksimalkan suatu kegiatan apakah kualitas kinerja yang diberikan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

c. Kepuasan kelompok sasaran

Kriteria ini melihat Bagaimana dampaknya langsung apakah dengan adanya program ini masyarakat miskin dapat merasakan kepuasan yang ada.

d. Daya tanggap client

Aspek ini berkaitan dengan komunikasi yang efektif dari suatu program terhadap kelompok sasaran tentunya.

e. Sistem pemeliharaan

Aspek ini berkaitan dengan instansi yang relatif stabil serta daya dukung pemerintah untuk keberlanjutan program tersebut.

Menurut (Makmur dalam Rosliana, 2019), Mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran

Bahwa suatu kegiatan yang berjangka panjang lebih berorientasi dan sifatnya strategic, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.

2. Ketepatan waktu

Pengoptimalan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dari target tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Ketepatan dalam penentuan pilihan

Ini berkaitan dengan ketepatan dalam memilih suatu metode maupun pekerjaan dari suatu kegiatan tersebut.

4. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Suatu organisasi akan terstruktur bila adanya kerja sama antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan dan biasanya tujuan dituangkan dalam sebuah dokumen yang tertulis dan sifatnya strategik sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi berikutnya.

2.1.4 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Steers (Dini, 2019) beberapa faktor faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi

Struktur dan Teknologi dalam organisasi sangat mempengaruhi segi segi efektivitas. Mengenai struktur dikatatakan bahwa meningkatnya suatu produktivitas dan efisiensi merupakan dari hasilnya spesialisasi fungsi yang maksimal termasuk didalamnya inovasi program, ukuran produktivitas, kepuasan kerja, rencana pengambilan keputusan, serta formalisasi seperti pelayanan, dan pengejaran tujuan. Teknologi juga sebagai aspek terpenting dari penyebabnya tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun secara tidak langsung tetapi bukti bukti

dari teknologi itu sendiri dapat merubah tatanan struktur yang berpengaruh dalam efektivitas organisasi tersebut.

2. Karakteristik Lingkungan

Dari segi lingkungan efektivitas dapat dilihat dari dua segi. Pertama, lingkungan luar yang menggambarkan kemampuan yang berada diluar organisasi seperti kondisi ekonomi. Kemudian kedua, lingkungan dalam yaitu faktor faktor dalam organisasi itu sendiri yang bersifat sosial yang mendukung keberlangsungan kegiatan agar mencapai tujuan yang disebut dengan “Iklim Organisasi”.

3. Karakteristik Pekerja

Faktor ketiga dari pengaruh efektivitas yaitu dari pekerja itu sendiri. Karena pekerja merupakan aspek terpenting dalam efektivitas. Perilaku pekerja sangat menentukan keberhasilan dari suatu tujuan dalam kegiatan dan kesadaran akan sifat perbedaan pribadi pekerja sangat penting dalam mencapai usaha yang diarahkan kepada tujuan.

2.2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Seperti yang diketahui bahwa di kondisi saat sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi terkhusus untuk masyarakat miskin. Masyarakat miskin sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk melihat kembali daerah daerah yang sangat membutuhkan bantuan tentunya. Hal seperti ini seharusnya sudah menjadi tugas pemerintah untuk meringankan sedikit beban dengan memberikan beberapa program yang dibuat guna untuk membantu masyarakat miskin yang butuh. Oleh karena itu pemerintah menyalurkan salah satu

program penting untuk meringankan beban kepada masyarakat miskin yaitu dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT.

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.200.000/KPM/

bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Multifiah (2011) mengatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan agenda yang utama dari pemerintah namun banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang menyebabkan kegagalan mulai dari politik, birokrasi, pelaksanaan program yang tumpang tindih dan lainnya. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mengagumkan pernah terjadi di Indonesia pada era orde baru, dimana masyarakat miskin yang semula 40% menurun menjadi 11 %. Kemiskinan merupakan hal yang sangat sulit untuk ditanggulangi hanya dalam satu periode pemerintahan, namun kemiskinan harus menjadi pusat perhatian pemerintah dan agenda jangka panjang yang secara terus menerus harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur strategi kembali terkait untuk penanggulangan kemiskinan yang harus diterapkan dalam kebijakan nasional maupun daerah yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Kemudian dengan adanya program BPNT ini diasumsikan akan dapat mempengaruhi pola perubahan pengeluaran keluarga penerima manfaat. Penyaluran beras bersubsidi untuk kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga rumah tangga

terhadap kebutuhan pangan. Selain itu juga adanya bantuan pangan non tunai (BPNT) ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

2.2.1 Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Keuangan Inklusif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

2.2.2 Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

2.2.3 Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adapun manfaat adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu :

1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
4. Meningkatnya transaksi sosial non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.
6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari pertama Kehidupan (HPK).

2.2.4 Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima Manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang namanya tergolong sebagai Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS- NG menu BSP.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai pasal 5 disebutkan kriteria penerima manfaat yakni:

1. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
2. KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS atau data

penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Kepesertaan KPM di dalam Program Sembako dapat berganti karena: (a) meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain; (b) merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke desa/kelurahan lain; (c) calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM; (d) calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih); dan (e) calon KPM sudah mampu.

2.2.5 Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam menjalankan program BPNT terdapat standart operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya. SOP dalam program BPNT adalah:

a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur BPNT. Koordinasi Pelaksanaan :

1) Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan

pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

2) Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

3) Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong. Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan ditingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa setempat serta pendamping program BPNT.

b. Penyerahan Data Penerima Manfaat

1. Jumlah pagu Peyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial yang akan disampaikan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri social

2. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM
3. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur
4. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian social diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/Walikota
5. Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meninggal, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda
6. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.

c. Persiapan E-Warong

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi e-warong dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran e-warong di setiap lokasi penyaluran.

Bank Penyalur harus merekrut e-warong dengan rasio e-warong dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) e-warong dalam satu desa/ kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio e-warong dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.

- b. Memberikan layanan perbankan kepada e-warong, termasuk diantaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/branding, perbaikan fasilitas e-warong dan lainnya untuk melayani KPM.
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
 - 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada e-warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM
 - 2) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo e-warong dan memastikan e-warong siap melayani
 - 3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
 - 4) Menyediakan petugas bank (Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person) yang dapat dihubungi oleh e-warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
 - 5) Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.

d. Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Edukasi dan Sosialisasi.

- 1) Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:
 - a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
 - b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.
 - c) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.
- 2) Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:
 - a) Kementerian atau Lembaga terkait.
 - b) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan.
 - d) Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya.
 - e) Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.
 - f) Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - g) Pemilik atau Pengelola e-warong.
 - h) Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik ditingkat pusat maupun cabang.

- 3) Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi. Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:
- a) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
 - b) Bank Penyalur.
 - c) Pemilik/Pengelola e-warong.

e. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo

Kartu Kombo merupakan uang elektronik yang dipakai untuk menukar bantuan pangan berupa beras dan telur. Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari :

1) Proses 1

Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.

2) Proses 2

Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada KPM. Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan distribusi Kit Kartu Kombo. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.

3) Proses 3

Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan dashboard Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

f. Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:

- 1) Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
- 2) Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
- 3) Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- 4) Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
- 5) Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
- 6) Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
- 7) Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
- 8) Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal

- 9) Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

g. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Datang; KPM membawa Kartu Kombo datang ke e-warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
2. Cek; Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
3. Pilih; Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
4. Terima; Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

Teori 5K (Ketepatan) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran adalah tolak ukur sejauh mana ketepatan dalam memilih penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan sesuai dengan ketentuan sebelumnya yang diberikan kepada masyarakat miskin yang benar benar memerlukan butuh bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Ketepatan Jumlah dan kualitas adalah ukuran baik dan buruknya bahan pangan yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang nantinya kebutuhan bahan pangan tersebut yang diterima sesuai dan berkualitas.

3. Ketepatan Waktu adalah kesesuaian jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam hal ini ketepatan waktu dilihat dari berjalannya suatu program dengan proses yang tepat atau lambat. Tentunya juga dengan memperhatikan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Ketepatan Tujuan adalah ketepatan usaha yang dilakukan dari suatu program maupun strategi yang matang terhadap berjalannya program yang dapat menunjukkan program tersebut mencapai tujuan keberhasilan atau tidak. Ketepatan tujuan juga sangat berpengaruh terhadap proses akhir dari suatu program yang telah dijalankan dan direncanakan sebelumnya. Pencapaian tujuan dapat dikatakan efektif bila program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memberikan kepuasan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
5. Ketepatan Administrasi merupakan bagian dari kerja sama antara semua pihak yang terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada saat penyaluran dana bantuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya.

2.3 Konsep Kemiskinan

2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik. Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan

berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek social dan moral. Sholeh dalam Ali khomsan dkk (2015:1)

Menurut Angraeni dalam Ali khomsan dkk (2015:8) Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis dan kondisi lingkungan. Kebutuhan pokok bisa diterjemahkan dalam suatu paket jasa dan barang yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat hidup secara manusiawi terdiri dari keperluan air bersih, komposisi pangan bernilai gizi cukup, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan yang terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok biasanya diakibatkan oleh :

1. Persepsi manusia akan kebutuhan pokok yang diperlukan
2. Posisi manusia di dalam lingkungan sekitarnya
3. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi

Garis kemiskinan (*poverty line*) bisa dibedakan antara garis kemiskinan makanan (*food poverty line*) maupun garis kemiskinan non makanan (*non food poverty line*). Yang karena perbedaan harga dan jenis komoditas yang dipakai maka besaran garis kemiskinan bias pula berbeda antar daerah dan antar desa- kota. Kemudian, melalui garis kemiskinan tersebut penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk miskin dan penduduk tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluarannya berada pada dan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu penduduk tidak miskin adalah penduduk yang pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan. (Yohandarwati dalam Ali khomsan dkk, 2015:7) .

Sedangkan menurut (Sajogyo dalam Takdir, 2013) menetapkan garis kemiskinan berdasarkan penghasilan rumah tangga senilai 360 Kg beras per tahun di perkotaan dan 240 Kg beras per tahun di pedesaan. Pengukuran garis kemiskinan ini menurut Sajogyo dapat dipakai untuk memperbandingkan tingkat hidup antar zaman dan antar ragam nilai rupiah.

Menurut pendapat (Suyanto dalam Nurjanah, 2017:51), ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan, yaitu :

1. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relative terisolasi atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

2.3.2 Ciri Ciri Kemiskinan

Dengan melihat banyaknya ukuran yang bisa dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan yaitu :

1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki factor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Factor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinn untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkatan pendidikan golongan miskin umunya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar.
4. Banyak diantara mereka yang tinggal didaerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau jika ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasat diluar pertanian.
5. Banyak diantara mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan.

2.3.3 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling

banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

- b. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
- c. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relative tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata acar modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros, atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- d. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya kebebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

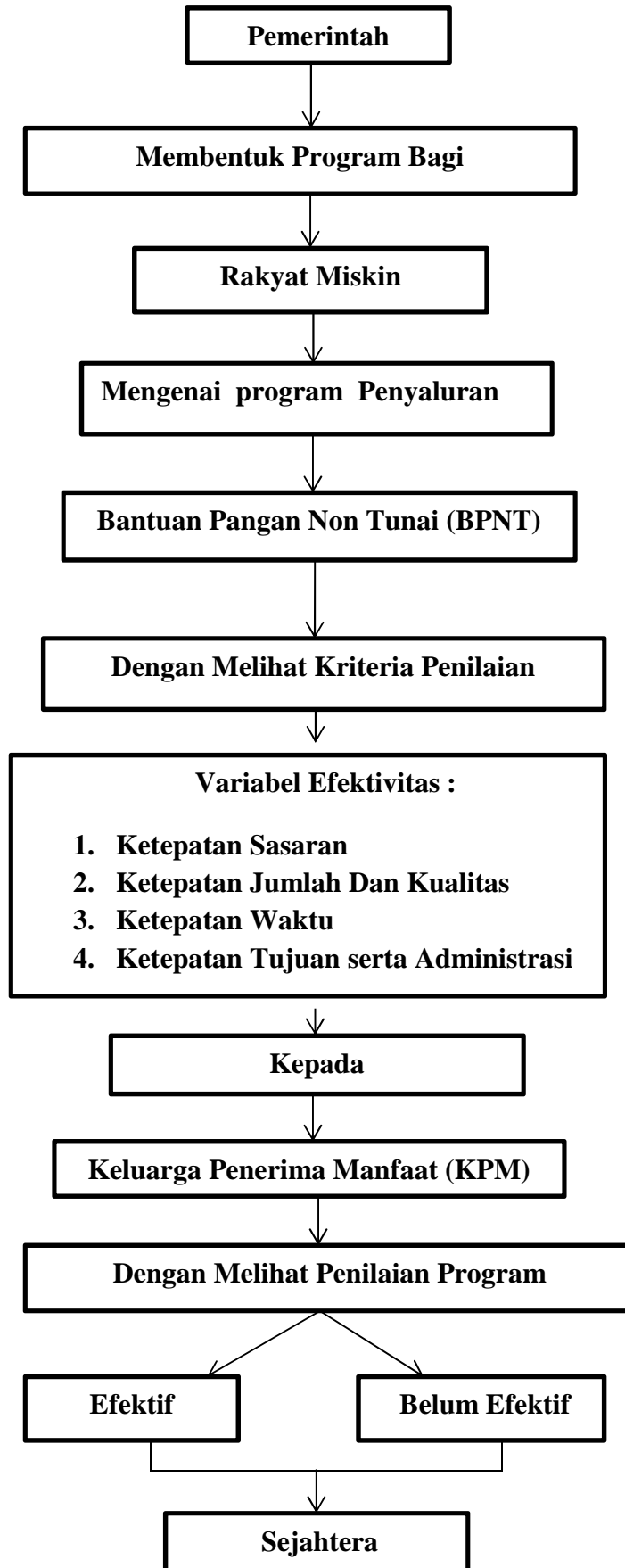
2.3.4 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan masalah utama disamping masalah pengangguran yang selalu menjadi pusat perhatian mendasar oleh pemerintah . apalagi di Indonesia masih banyak memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemberantasan kemiskinan. Di setiap Negara penyebab kemiskinan sangat beragam, bahkan masalah kemiskinan seperti ketersediaan kebutuhan pokok merupakan salah satu masalah yang krusial bagi pemerintah yang dapat menjatuhkan . maka untuk itu terlalu tingginya kebutuhan pokok akan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya terutama pangan. Disamping itu masalah kemiskinan juga menjadi dalang dari keharmonisan rumah tangga setiap orang.

Dari tingginya angka kemiskinan tersebut saat ini pemerintah mengambil peran penting dengan memberikan program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk mengatasi permasalahan pangannya. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan subsidi pangan dalam bentuk non tunai yang bertujuan untuk mengurangi beban setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga masyarakat juga memiliki akses terhadap hak dasarnya untuk mendapatkan bantuan yang disalurkan pemerintah.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diharapkan dalam pelaksanaannya agar efektif. Efektivitas pelaksanaan program BPNT dapat dinilai dengan menggunakan beberapa variabel diantaranya sebagai berikut : tepat sasaran, tepat jumlah dan kualitas, tepat waktu, tepat tujuan, serta tepat administrasi.

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran



2.3.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Kerangka Penelitian diatas, Maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

Tingkat Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPBT) diukur berdasarkan kelima variabel pelaksanaan program dimana Ketepatan Sasaran, Ketepatan Jumlah dan Kualitas, Ketepatan Waktu, Ketepatan Tujuan serta Ketepatan Administrasi dikatakan sudah efektif.